

Abstrak

Dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualifikasi agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian antara hasil opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemda Klaten Tahun 2016-2019 dengan kriteria penentuan opini yang terdapat pada UU No. 15 Tahun 2004, lalu dengan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 300) terkait unsur LHP, serta kesesuaian dengan Standar Audit (SA 700) tentang perumusan suatu opini. Metode penulisan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan berlandaskan berbagai peraturan pemerintah seperti UU No. 15 Tahun 2004, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), serta Standar Audit. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website E-PPID BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil opini BPK atas Laporan keuangan Pemda Klaten Tahun 2016-2019 telah sesuai dengan kriteria umum penentuan opini yang terdapat pada UU No. 15 Tahun 2004, lalu untuk unsur LHP yang terdapat pada LHP LKPD Aceh Tenggara sudah sesuai dengan kriteria yang ada pada Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 300) yang terdapat pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), serta hasil opini yang diberikan BPK juga sudah sesuai dengan kriteria perumusan opini yang ada pada Standar Audit (SA 700).

Kata Kunci: laporan keuangan pemerintah daerah, kesesuaian opini, BPK RI

Abstract

In preparing the report on the results of the examination of the financial statements, qualifications must be met so that the information presented can be used and used as a decision-making tool. The purpose of writing this paper is to find out between the results of BPK RI's opinion on the Klaten Regional Government Financial Statements for 2016-2019 with the opinion criteria contained in Law no. 15 of 2004, with Financial Audit Reporting Standards (PSP 300) related to LHP elements, and in accordance with Auditing Standards (SA 700) regarding the formulation of an opinion. The writing method used is descriptive qualitative with various government regulations such as Law no. 15 of 2004, State Financial Audit Standards (SPKN), and Audit Standards. This writing uses secondary data obtained from the BPK RI E-PPID website. The results of this study indicate that the results of the BPK's opinion on the Klaten Regional Government in 2019 are in accordance with the general opinion report contained in Law no. 15 of 2004, then the LHP elements contained in the Southeast Aceh LKPD LHP are in accordance with the criteria contained in the Financial Audit Reporting Standard (PSP 300) contained in the State Financial Audit Standard (SPKN), and the results of the opinion given by the BPK are also in accordance with with the criteria for the formulation of an opinion in the Auditing Standards (SA 700).

Keyword: local government financial reports, conformity of opinion, BPK RI